



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 1 (2026) pp: 5984-5992

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Program Pengembangan Usaha Bisnis Perempuan Di Bumdes Dlanggu Mojokerto

Alimatul Farida¹, Ifdholul Maghfur², Putri Dwi Amalia³, Yulviana Samrotul Ilmi⁴, Ainun Khafidotul Fitria⁵

^{1,2,3,4,5}Program Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Yudharta Pasuruan

farida@yudharta.ac.id¹, ifdhol@yudharta.ac.id², amaliaaputri2206@gmail.com³, via820764@gmail.com⁴,
ainunkhafidhotul315@gmail.com⁵

Abstrak

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memegang peranan krusial dalam mengakselerasi pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan, terutama bagi kaum perempuan, melalui pengelolaan unit usaha simpan pinjam berbasis kelompok. Salah satu mekanisme pembiayaan yang diimplementasikan adalah sistem tanggung renteng, sebuah model pembiayaan yang mengedepankan prinsip tanggung jawab kolektif antaranggota kelompok sebagai alternatif pengganti jaminan formal. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah secara mendalam implementasi sistem tanggung renteng dalam inisiatif pengembangan bisnis perempuan di BUMDesma Dasema LKd, Kecamatan Dlanggu, Kabupaten Mojokerto. Selain itu, penelitian ini menganalisis peran sistem tersebut dalam memitigasi risiko pinjaman serta memperkuat struktur modal sosial di lingkungan masyarakat. Metode yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi lapangan, wawancara mendalam bersama pengelola BUMDesma Dasema LKD Kec. dlanggu serta anggota kelompok simpan pinjam, dan studi dokumentasi. Proses analisis data mencakup reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem tanggung renteng efektif dalam menekan angka kredit bermasalah dan meningkatkan kedisiplinan pembayaran. Lebih jauh lagi, sistem ini mampu mempererat solidaritas, membangun kepercayaan, dan menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama di antara anggota kelompok perempuan. Meski memberikan dampak positif yang signifikan, keberlanjutan program ini masih menemui hambatan nyata, yakni rendahnya tingkat literasi keuangan dan kurangnya kedisiplinan sebagian anggota dalam mematuhi regulasi pembayaran yang telah disepakati bersama. Diperlukan edukasi berkelanjutan untuk mengatasi kendala tersebut demi stabilitas usaha di masa depan.

Kata kunci: Pengembangan Usaha, BUMDes, Pemberdayaan Perempuan.

1. Latar Belakang

Pemberdayaan perempuan merupakan salah satu pilar yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi desa yang berkelanjutan. Karena perempuan desa memiliki potensi yang besar sebagai pelaku usaha mikro dan kecil yang dapat berkontribusi langsung terhadap peningkatan pendapatan keluarga dan kesejahteraan masyarakat. Namun, berbagai keterbatasan struktural seperti minimnya akses terhadap permodalan, rendahnya literasi keuangan karena literasi keuangan merupakan suatu hal yang penting dimiliki oleh setiap individu agar dapat menetapkan skala prioritas dalam pengelolaan keuangan serta mampu membedakan antara kebutuhan dan keinginan[1], selain itu keterbatasan jaminan usaha masih menjadi kendala utama yang dihadapi perempuan dalam mengembangkan aktivitas bisnisnya. Kondisi ini menuntut adanya model pembiayaan yang inklusif dan berbasis komunitas agar perempuan desa dapat berperan lebih optimal dalam perekonomian lokal.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha yang dibentuk oleh desa dan dikelola secara mandiri oleh pemerintah desa bersama masyarakat, dengan tujuan mengelola potensi ekonomi setempat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa[2]. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) hadir sebagai instrumen strategis desa yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga memiliki fungsi sosial dalam memberdayakan masyarakat[3]. Penelitian Kurniawanto dan Anggraini menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan melalui pengembangan BUMDes dapat dilakukan dengan memanfaatkan potensi lokal, khususnya sektor pertanian, sehingga perempuan tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga subjek aktif dalam pengelolaan usaha desa[4]. Temuan ini menegaskan bahwa BUMDesma Kec. Dlanggu memiliki kapasitas kelembagaan untuk mendorong partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi produktif melalui skema usaha dan pembiayaan yang sesuai dengan karakteristik desa. Pembiayaan sendiri adalah penyediaan uang, tagihan, atau pemberian fasilitas untuk menyediakan dana untuk beberapa jenis transaksi, seperti transaksi bagi hasil, sewa-menyewa, jual beli, dan pinjam-meminjam, yang didasarkan pada kesepakatan antara beberapa pihak atau

kesepakatan antara bank dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.[5]

Selain itu, penelitian Ali, Ilmi, Ulpah, Sidik, Aisyah, dan Tazkiatunnafsi menekankan pentingnya pendekatan partisipatif dalam pemberdayaan perempuan desa dimulai dengan pembentukan koperasi perempuan dan pengelolaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dengan menggunakan pendekatan Participatory Action Research (PAR), penelitian tersebut membuktikan bahwa keterlibatan aktif perempuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program. Ekonomi juga merupakan salah satu hal yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia manapun, selain itu ekonomi juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tidak itu saja ekonomi juga berperan dalam kemajuan negara,[6]ekonomi juga dapat meningkatkan rasa kepemilikan, kemandirian, serta keberlanjutan usaha yang dijalankan. Pendekatan partisipatif ini relevan untuk diterapkan dalam pengembangan program pembiayaan usaha perempuan berbasis BUMDes. Di Desa Ngembah, Kecamatan Dlanggu, Kabupaten Mojokerto, BUMDes berupaya mengembangkan program pembiayaan usaha bisnis perempuan sebagai respons terhadap kebutuhan modal usaha yang mudah diakses dan berkeadilan. Program ini dirancang untuk memberikan dukungan permodalan kepada perempuan pelaku usaha mikro melalui mekanisme pembiayaan berbasis kelompok yang mengedepankan prinsip kebersamaan, kepercayaan, dan tanggung jawab kolektif. Melalui program ini, BUMDes tidak hanya berperan sebagai lembaga penyedia modal, tetapi juga sebagai fasilitator pemberdayaan ekonomi perempuan desa.

Program Pengembangan Pembiayaan Usaha Bisnis Perempuan di BUMDes Ngembah Dlanggu Mojokerto diharapkan mampu memperkuat kapasitas ekonomi perempuan melalui peningkatan akses permodalan, penguatan kelembagaan kelompok usaha, serta peningkatan kemampuan pengelolaan usaha dan keuangan. Program ini mendorong partisipasi aktif perempuan dalam setiap tahapan kegiatan, sehingga perempuan tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga menjadi aktor utama dalam pengembangan usaha dan pengambilan keputusan ekonomi di tingkat desa. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Adalah Pemberdayaan ekonomi perempuan di pedesaan yang menjadi salah satu strategi penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Salah satu pendekatan yang banyak diterapkan dalam program pembiayaan kelompok perempuan adalah sistem tanggung renteng, di mana setiap anggota kelompok memiliki tanggung jawab bersama atas pinjaman yang diterima oleh kelompok tersebut. Sistem ini telah terbukti efektif dalam memperluas akses perempuan terhadap pembiayaan, memperkuat solidaritas sosial, serta meningkatkan disiplin dan tanggung jawab kolektif dalam pengelolaan keuangan kelompok[7] Dalam konteks kelembagaan desa.

Praktik tanggung renteng dalam program pembiayaan kelompok perempuan di BUMDES Dlanggu merupakan salah satu inovasi yang bertujuan untuk meningkatkan akses permodalan bagi perempuan di pedesaan. Selama pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di BUMDESMA Dlanggu, saya mengamati bahwa sistem tanggung renteng menjadi strategi utama dalam memperkuat solidaritas dan rasa tanggung jawab bersama di antara anggota kelompok. BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) Dlanggu memfasilitasi kelompok perempuan untuk mendapatkan pembiayaan secara kolektif, di mana setiap anggota kelompok saling menjamin satu sama lain. Sistem ini tidak hanya memudahkan proses pengajuan pinjaman, tetapi juga mendorong kedisiplinan dalam pembayaran cicilan karena adanya rasa saling percaya dan dukungan antar anggota. Selain itu, praktik tanggung renteng merupakan suatu pengalihan tanggung jawab terhadap pembayaran yang terhutang secara berantai (berurutan) berdasarkan urutan yang berlaku[8]. Selain itu, Tanggung renteng juga memberikan ruang bagi perempuan untuk saling berbagi pengalaman, pengetahuan, dan motivasi dalam mengembangkan usaha mikro yang mereka jalankan.

Melalui program ini, BUMDES Dlanggu berupaya memberdayakan perempuan desa agar lebih mandiri secara ekonomi dan mampu berkontribusi dalam pembangunan desa. Dengan adanya praktik tanggung renteng, diharapkan risiko kredit macet dapat diminimalisir dan keberlanjutan program pembiayaan kelompok perempuan dapat terjaga dengan baik. Pendekatan ini menjadi contoh nyata bagaimana kolaborasi dan kepercayaan dapat menjadi fondasi utama dalam pengelolaan program ekonomi berbasis komunitas di tingkat desa. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berperan sebagai motor penggerak ekonomi yang menyediakan berbagai layanan, termasuk program pembiayaan berbasis kelompok, Penerapan praktik tanggung renteng, di BUMDes tidak hanya bertujuan untuk meminimalisir risiko kredit macet, tetapi juga untuk mendorong partisipasi aktif perempuan dalam kegiatan ekonomi produktif dan pengambilan keputusan. Melalui mekanisme ini, perempuan desa didorong untuk saling mendukung, melakukan pengawasan internal, dan membangun kepercayaan antar anggota, sehingga tercipta lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan usaha mikro kecil[9]. Namun, di balik berbagai keunggulan tersebut, praktik tanggung renteng juga menghadapi tantangan, seperti potensi tekanan sosial antar anggota dan perlunya penguatan kapasitas kelompok dalam manajemen keuangan. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai praktik tanggung renteng dalam program pembiayaan kelompok perempuan di BUMDes Dlanggu menjadi penting untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas program, sekaligus memperkuat peran perempuan dalam pembangunan ekonomi desa.

Meskipun peran BUMDes sangat penting, unit usaha simpan pinjam di tingkat desa sering dihadapkan pada tantangan besar, yaitu risiko kredit macet (*Non-Performing Loan*) akibat ketiadaan agunan fisik yang memadai dari peminjam. Kondisi ini diperparah oleh fakta bahwa mayoritas pelaku usaha mikro perempuan di desa tidak memiliki sertifikat aset yang dapat dijadikan jaminan. Untuk mengatasi kerentanan ini, inovasi diperlukan untuk menggantikan jaminan benda dengan jaminan berbasis komunitas. Fokus pada BUMDes Dlanggu menjadi relevan karena BUMDes ini telah mengadopsi mekanisme mitigasi risiko yang unik, yaitu praktik Tanggung Renteng. Tanggung Renteng adalah sistem pembiayaan kelompok di mana seluruh anggota kelompok secara kolektif bertanggung jawab atas pinjaman yang diterima oleh salah satu anggotanya. Praktik ini secara efektif mengubah risiko individu menjadi risiko kolektif, sehingga menumbuhkan rasa kebersamaan dan pengawasan sosial. Literatur terbaru telah menunjukkan bahwa model Tanggung Renteng sangat efektif diimplementasikan pada lembaga keuangan mikro berbasis desa karena mampu menyeimbangkan aspek ekonomi dan sosial. Namun, analisis mendalam mengenai bagaimana dinamika sosial seperti *modal sosial* dan *trust* bekerja pada tingkat operasional unit usaha BUMDes, khususnya yang dikelola oleh perempuan, masih memerlukan deskripsi yang lebih spesifik dan rinci.

Inisiatif pembiayaan ini seringkali dioperasikan dengan mengadopsi model tanggung renteng. Konsep tanggung renteng bukanlah sekadar mekanisme jaminan pinjaman alternatif, melainkan sebuah filosofi sosial yang mengakar kuat pada prinsip-prinsip luhur masyarakat Indonesia: solidaritas, gotong royong, dan pertanggungjawaban kolektif [10]. Dalam konteks ekonomi, tanggung renteng adalah praktik di mana anggota kelompok secara kolektif menanggung risiko gagal bayar, sehingga menjamin keberlanjutan modal BUMDES tanpa memerlukan agunan material. Artikel ini bertujuan untuk menjabarkan dan menganalisis bagaimana praktik tanggung renteng.

mengimplementasikan dan berperan sebagai kunci keberhasilan dalam program pembiayaan kelompok perempuan yang dikelola oleh BUMDES Dlanggu. BUMDES Dlanggu menjadi contoh studi kasus yang menarik karena berhasil membuktikan bahwa modal sosial (kepercayaan dan solidaritas) dapat berfungsi sebagai jaminan yang jauh lebih kuat dibandingkan modal fisik. Keberhasilan ini tidak hanya diukur dari tingginya tingkat pengembalian pinjaman (*repayment rate*), tetapi juga dari semakin kuatnya kohesi sosial, peningkatan kapasitas usaha, dan memberdayakan perempuan secara ekonomi di wilayah desa tersebut.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai pelaksanaan kegiatan PKL di BUMDes bersama DASEMA LKD Dlanggu, khususnya terkait unit usaha simpan pinjam dan praktik tanggung renteng. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk mendeskripsikan fenomena sosial-ekonomi serta interaksi antaranggota kelompok secara sistematis.

Teknik Pengumpulan Data Data dikumpulkan melalui beberapa metode, yaitu:

1. Observasi Lapangan, dilakukan untuk memantau langsung proses operasional unit usaha simpan pinjam, pola interaksi anggota kelompok, serta pelaksanaan praktik tanggung renteng.
2. Wawancara Mendalam, dilakukan dengan pengurus BUMDes dan anggota kelompok simpan pinjam untuk memperoleh informasi terkait mekanisme pembiayaan, disiplin pembayaran, dan dampak sosial-ekonomi program.
3. Studi Dokumentasi, berupa pencatatan laporan kegiatan, data anggota kelompok, dan dokumen internal BUMDes yang relevan dengan kegiatan PKL.

Analisis Data Data dianalisis melalui tahapan:

1. Reduksi Data, yaitu menyaring dan menyeleksi informasi yang relevan.
2. Penyajian Data, dilakukan dengan menyusun temuan berdasarkan kategori kegiatan, mekanisme tanggung renteng, dan dampak sosial-ekonomi.
3. Penarikan Kesimpulan, dilakukan untuk menggambarkan keseluruhan hasil PKL, termasuk keberhasilan, tantangan, dan pelajaran yang diperoleh.

Metode ini memungkinkan peneliti memperoleh gambaran komprehensif mengenai praktik tanggung renteng sebagai mekanisme mitigasi risiko kredit, penguatan modal sosial, serta pemberdayaan ekonomi perempuan di desa, sesuai dengan tujuan PKL.

2.1. Tempat dan waktu pelaksanaan

Tabel 1. Tempat Dan Waktu Pengabdian

Aspek	Detail Pelaksanaan
Tempat Kegiatan (Lokasi Primer)	BUMDes bersama DASEMA LKD Dlanggu, Kecamatan Dlanggu, Kabupaten Mojokerto. Unit usaha simpan pinjam dan program pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya perempuan.
Alasan Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> • BUMDes Dlanggu merupakan pusat pemberdayaan ekonomi lokal yang aktif menjalankan program simpan pinjam dan pendampingan usaha. • Tempat strategis untuk mempelajari pengelolaan keuangan mikro berbasis kelompok. • Memberikan pengalaman langsung dalam implementasi praktik tanggung renteng dan pembinaan modal sosial. • Relevan dengan fokus akademik mahasiswa pada ekonomi mikro dan pemberdayaan ekonomi perempuan.
Waktu Pelaksanaan	Mulai tanggal [isi tanggal mulai] hingga [isi tanggal selesai], selama masa PKL [misal 1 bulan / 2 bulan].
Alokasi Waktu Inti	<ul style="list-style-type: none"> • Observasi kegiatan operasional unit simpan pinjam setiap hari kerja. • Wawancara dan pendampingan anggota kelompok simpan pinjam 2-3 kali per minggu. • Analisis dokumentasi dan pencatatan data kegiatan mingguan. Evaluasi dan refleksi kegiatan PKL setiap akhir minggu untuk disusun menjadi laporan dan kaleidoskop.

2.2. Target Audiens / Mitra Aktivitas

Target audiens dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di BUMDes bekerja sama dengan DASEMA LKD Dlanggu mencakup berbagai pihak yang berkolaborasi secara langsung maupun yang akan menerima hasil dari program pemberdayaan ekonomi. Sasaran yang utama adalah:

1. Anggota kelompok simpan pinjam perempuan di desa, yang menjadi penerima layanan pendanaan dengan tanggung renteng serta pelaku inti dalam program pemberdayaan ekonomi di tingkat desa. Kelompok ini menjadi perhatian utama karena mereka mengalami kesulitan akses ke lembaga keuangan formal dan peran pentingnya dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui usaha yang produktif. Hal ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa kelompok perempuan berusaha menjadi fokus utama dalam pemberdayaan ekonomi melalui sistem simpan pinjam untuk mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kemandirian ekonominya.[11]
2. Pengurus BUMDes Dlanggu, yang berfungsi sebagai mitra strategis dalam implementasi program simpan pinjam serta pembinaan kelompok. Peranan pengurus sangat krusial dalam operasional, pengambilan keputusan, serta memfasilitasi kegiatan kelompok perempuan yang menjadi fokus. Dukungan manajerial yang solid mampu meningkatkan efektivitas program pemberdayaan masyarakat oleh BUMDes.[12]
3. Komunitas desa secara keseluruhan, termasuk tokoh-tokoh masyarakat dan pelaku usaha mikro setempat yang berpotensi menjadi mitra dalam pengembangan ekosistem ekonomi desa melalui kerja sama dengan unit simpan pinjam. Keterlibatan masyarakat luas berkontribusi pada peningkatan kesadaran sosial dan dukungan untuk keberlanjutan kegiatan pemberdayaan ekonomi. Penelitian menunjukkan bahwa partisipasi komunitas dan kemitraan dengan para pemangku kepentingan lokal sangat penting untuk kesuksesan program pemberdayaan ekonomi yang berbasis pada social entrepreneurship di BUMDes.[13]

2.3. Jenis Data dan Sumber Data

Pengumpulan dan analisis data yang teliti sangatlah krusial untuk menghasilkan penelitian yang bermakna karena dapat memberikan kontribusi pada pengetahuan dalam penyelesaian masalah[14] maka dari itu Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder untuk memperoleh gambaran yang komprehensif. mengenai pelaksanaan PKL di BUMDes Dlanggu. Dalam Pemilihan metode pengumpulan data juga perlu untuk memperhitungkan tujuan riset, tipe data yang dibutuhkan, serta batasan waktu dan sumber daya. Untuk menguasai ciri-ciri setiap metode karena dapat memungkinkan peneliti untuk menentukan pendekatan yang paling tepat dan efisien guna mencapai sasaran penelitian[15]. Maka dari itu peneliti memperoleh informasi langsung mengenai mekanisme tanggung renteng, kedisiplinan anggota, interaksi kelompok, dan dampak sosial-ekonomi program pemberdayaan. Dengan melakukan observasi lapangan, wawancara mendalam dengan pengurus BUMDes dan

anggota kelompok simpan pinjam, serta catatan kegiatan harian selama PKL. Data Sekunder untuk melengkapi dan memperkuat analisis, serta memahami konteks teori dan praktik pemberdayaan ekonomi perempuan melalui pembiayaan kelompok. Dengan melakukan Dokumen internal BUMDes (laporan kegiatan, data anggota kelompok), literatur akademik, jurnal, dan publikasi terkait sistem pembiayaan mikro dan tanggung renteng. Dengan penggunaan kedua jenis data ini, penelitian mampu memberikan pemahaman yang menyeluruh mengenai praktik PKL di BUMDes, termasuk efektivitas sistem tanggung renteng dalam mendukung pemberdayaan ekonomi perempuan dan penguatan modal sosial

2.4. Indikator Keberhasilan

Keberhasilan implementasi PKL di BUMDes bersama DASEMA LKD Dlanggu dievaluasi melalui beberapa aspek. Pertama, kemampuan mahasiswa dalam memahami cara kerja unit simpan pinjam dan praktik tanggung renteng, yang meliputi keterampilan dalam mengamati, mencatat, dan menganalisis data kegiatan. Kedua, efektivitas pelaksanaan program simpan pinjam, yang terlihat dari peningkatan disiplin anggota dalam melakukan pembayaran serta penurunan angka kredit macet. Ketiga, penguatan modal sosial dan solidaritas antar anggota, yang ditunjukkan oleh adanya kerja sama, gotong royong, tanggung jawab bersama, serta tingginya partisipasi anggota dalam kegiatan kelompok dan proses pengambilan keputusan. Keempat, penggunaan data dan informasi sepanjang PKL, yang tercermin dari kemampuan mahasiswa dalam menyusun laporan dan ringkasan kegiatan secara menyeluruh dan informatif. Indikator-indikator ini digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana tujuan PKL dapat tercapai, baik dari perspektif pembelajaran mahasiswa maupun pengaruh kegiatan terhadap kelompok sasaran di BUMDes.

2.5. Metode Evaluasi

Evaluasi pelaksanaan PKL dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif, berfokus pada pencapaian tujuan dan indikator keberhasilan kegiatan. Metode ini mencakup observasi langsung terhadap kegiatan operasional simpan pinjam, wawancara dengan pengurus dan anggota kelompok simpan pinjam, serta analisis dokumen internal BUMDes. Data evaluasi dikumpulkan untuk menilai efektivitas praktik tanggung renteng, kedisiplinan anggota, penguatan modal sosial, serta pencapaian pembelajaran mahasiswa. Hasil evaluasi kemudian dianalisis secara deskriptif untuk menarik kesimpulan mengenai keberhasilan program PKL dan rekomendasi perbaikan bagi pengelolaan kegiatan di masa mendatang.

3. Hasil dan Diskusi

Selama pelaksanaan PKL di BUMDesma Dlanggu, kegiatan dilakukan secara bertahap mulai dari minggu awal hingga minggu terakhir, mencakup seluruh proses operasional dan program pemberdayaan ekonomi masyarakat

3.1. Minggu Awal



Gambar 1.pengenalan dan observasi BUMDesma

Pada minggu pertama, mahasiswa melakukan observasi dan pengenalan terhadap struktur organisasi BUMDesma, termasuk unit usaha simpan pinjam dan program-program pemberdayaan ekonomi. Kegiatan ini meliputi observasi kegiatan harian, memahami prosedur pencairan dana, dan mempelajari sistem administrasi anggota kelompok. Mahasiswa juga mengikuti rapat internal BUMDesma untuk memahami mekanisme koordinasi antarpengurus dan pembagian tugas dalam pelaksanaan program. Aktivitas ini memberikan gambaran awal mengenai operasional dan tata kelola unit usaha simpan pinjam, sekaligus menyiapkan mahasiswa untuk kegiatan lapangan selanjutnya.

3.2. Minggu Kedua hingga Ketiga



Gambar 2. Verifikasi Data

Pada minggu kedua dan ketiga, mahasiswa terlibat dalam kegiatan verifikasi data di desa-desa sasaran. Verifikasi data sendiri yaitu merupakan suatu proses pengecekan data yang telah dikumpulkan atau diperbarui agar sesuai dengan kondisi nyata di lapangan[16]. Kegiatan verifikasi ini meliputi pengecekan dokumen anggota kelompok simpan pinjam, validasi data penerima dana, dan memastikan kelengkapan administrasi sesuai prosedur BUMDesma. Selain itu, mahasiswa turut serta dalam rapat koordinasi dengan pengurus BUMDesma dan tokoh masyarakat untuk membahas hasil verifikasi dan rencana pencairan dana. Kegiatan ini memungkinkan mahasiswa memahami secara praktis proses pengawasan dan pengendalian risiko dalam pengelolaan keuangan mikro di tingkat desa.

3.3. Minggu Kedua hingga Ketiga



Gambar 3. Pencairan Dana Simpan Pinjam

Pada minggu keempat dan kelima, mahasiswa mengikuti proses pencairan dana kepada masyarakat, termasuk kegiatan pembagian dana secara langsung kepada anggota kelompok simpan pinjam. Kegiatan ini diawasi oleh pengurus BUMDesma dan mahasiswa berperan dalam memastikan prosedur pencairan berjalan sesuai ketentuan, serta membantu mencatat setiap transaksi dan mengedukasi masyarakat mengenai kewajiban pembayaran dan penggunaan dana. Selain itu, mahasiswa juga terlibat dalam program pembagian wajib beli, yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan usaha BUMDesma dan mendukung keberlanjutan program.

3.4. Minggu Kedua hingga Ketiga



Gambar 4. Evaluasi Dan Dokumentasi Kegiatan

Pada minggu terakhir, mahasiswa melakukan evaluasi dan dokumentasi hasil kegiatan PKL. Kegiatan ini mencakup analisis data hasil verifikasi, pencairan dana, dan partisipasi masyarakat dalam program wajib beli. Mahasiswa menyusun laporan serta melakukan refleksi mengenai efektivitas program dan kendala yang dihadapi selama pelaksanaan PKL. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa proses verifikasi, pencairan dana, dan pembagian wajib beli berjalan efektif, meskipun terdapat beberapa kendala seperti ketidaklengkapan dokumen dan rendahnya literasi keuangan sebagian anggota.

3.5. Pembahasan

Hasil kegiatan PKL menunjukkan bahwa mahasiswa memperoleh pemahaman praktis mengenai pengelolaan unit usaha simpan pinjam di BUMDesma, termasuk penerapan mekanisme tanggung renteng sebagai alat mitigasi risiko kredit. Kegiatan verifikasi data dan pencairan dana memberikan wawasan langsung mengenai proses administrasi dan kontrol keuangan mikro di tingkat desa. Selain itu, partisipasi mahasiswa dalam rapat koordinasi dan pendampingan anggota kelompok memperkuat keterampilan komunikasi, kerja sama, dan analisis sosial-ekonomi masyarakat. Aktivitas pembagian wajib beli juga menunjukkan pentingnya strategi pemberdayaan ekonomi yang terstruktur dan berkelanjutan. Secara keseluruhan kegiatan PKL di BUMDesma Dlanggu ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman mahasiswa mengenai pengelolaan keuangan mikro, pemberdayaan ekonomi perempuan, dan penguatan modal sosial di masyarakat desa. Pengalaman Praktik Kerja lapangan ini sekaligus menegaskan bahwa efektivitas program sangat bergantung pada keterlibatan aktif pengurus, partisipasi masyarakat, serta pemahaman prosedur administrasi yang baik.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan pelaksanaan PKL di BUMDes Dlanggu, dapat disimpulkan bahwa penerapan mekanisme *tanggung renteng* pada unit usaha simpan pinjam terbukti sangat efektif dalam meningkatkan kedisiplinan pembayaran dalam menekankan tingkat kredit macet (*non-performing loan*). Hal ini menunjukkan bahwa *tanggung renteng* dapat berperan sebagai alat mitigasi risiko kredit dalam konteks pembiayaan kelompok, di mana solidaritas dan tanggung jawab kolektif antaranggota menjadi pendorong utama keberhasilan pengembalian pinjaman sesuai dengan tujuan inklusi keuangan. Temuan ini didukung oleh kajian empiris yang menunjukkan bahwa *joint liability* berkontribusi positif terhadap performa pengembalian pinjaman dalam model pembiayaan kelompok.[17] Selain itu, sistem *tanggung renteng* berperan dalam penguatan modal sosial di kalangan anggota kelompok perempuan, tercermin dari meningkatnya kerja sama, rasa percaya, dan dukungan antaranggota selama proses verifikasi data, pencairan dana, dan pembagian wajib beli. Modal sosial ini bukan hanya memupuk kedisiplinan finansial tetapi juga memperkuat jaringan sosial yang mendukung keberlanjutan kegiatan pemberdayaan ekonomi. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa kapital sosial (*trust, norms, networks*) dalam kelompok *joint liability* memiliki pengaruh positif terhadap kinerja lembaga pembiayaan dalam konteks pemberdayaan ekonomi dan loyalitas anggota.[18] Meskipun demikian, terdapat beberapa kendala seperti rendahnya literasi keuangan dan ketidakpatuhan sebagian anggota terhadap jadwal pembayaran, yang berpotensi melemahkan efektivitas mekanisme *tanggung renteng*. Hal ini menunjukkan bahwa

pendekatan *tanggung renteng* perlu dibarengi dengan upaya edukasi dan pendampingan lanjutan guna memperkuat kapasitas anggota dalam pengelolaan keuangan individu maupun kelompok. Kondisi ini mencerminkan dinamika serupa yang diidentifikasi dalam kajian literatur mengenai tantangan implementasi *tanggung renteng* dalam pembiayaan mikro berbasis kelompok.[19] Penelitian ini dibuat untuk menghasilkan laporan kegiatan dari Praktik Kerja Lapangan (PKL), Praktik Kerja Lapangan sendiri merupakan salah satu jenis aktifitas kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan memperluas pengetahuan mahasiswa, untuk mengenalkan mereka pada lingkungan kerja[20]. Dimana kegiatan ini dilaksanakan bertempat di BUMDes bersama DASEMA LKD Dlanggu yang berfokus pada pengelolaan unit usaha simpan pinjam dengan sistem tanggung renteng. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa penerapan tanggung renteng berperan penting dalam mendukung kedisiplinan pembayaran, penguatan modal sosial, serta pemberdayaan ekonomi perempuan di tingkat desa. Diharapkan artikel ini dapat memberikan kontribusi akademik dan menjadi bahan referensi bagi pengembangan pengelolaan BUMDes dan penelitian selanjutnya. Penulis mengucapkan terima kasih kepada pengurus dan seluruh pihak BUMDes bersama DASEMA LKD Dlanggu atas kesempatan, dukungan, dan kerja sama selama pelaksanaan PKL. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada dosen pembimbing dan dosen penguji atas bimbingan atas arahan, serta masukan yang sudah diberikan kepada kami dalam penyusunan artikel ini.

Referensi

- [1] Z. Azmi et al., “Jurnal Pengabdian Untuk Mu NegeRI,” J. Pengabd. UntukMu NegeRI, vol. 2, no. 1, pp. 66–73, 2018, DOI: <https://doi.org/10.37859/jpumri.v2i1.599>
- [2] E. Triyo, Haryono, and Irwanto, “Strategi inovasi badan usaha milik desa (BUMDes) dalam meningkatkan potensi dan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa (Studi pada BUMDes Mandiri, Desa Morobakung, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik),” *J. Litbang Kebijakan*, vol. 14, no. 2, pp. 172–182, 2020, doi: 10.32781/cakrawala.v14i2.353.
- [3] P. P. R. A. Dewi, “Meningkatkan Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Penggerak Ekonomi Desa Bengkel Sari,” *Civ. J. Pengabd. dan Inov. Masy.*, vol. 1, no. 3, pp. 143–147, 2025, doi: 10.59696/civicaaction.v1i3.223.
- [4] N. ‘Ain U. Wattiheluw and L. G. Loupatty, “ANALISIS PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DALAM MEWUJUDKAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) DESA DI KOTA AMBON,” *J. Akunt. Kompetif*, vol. 8, no. 2, pp. 410–419, 2025, doi: 10.35446/akuntansikompetif.v8i2.2179.
- [5] Rhey Wiky Aulia, Alimatul Farida, and Muhammad Fahmul Iltiham, “ANALISIS PERHITUNGAN DAN MEKANISME PENGAJUAN PEMBIAYAAN PADA AKAD MURABAHAH (Studi Kasus Pada PT. BPRS Kota Mojokerto KCP Pandaan),” *Malia (Terakreditasi)*, vol. 10, no. 2, pp. 221–236, 2019, doi: 10.35891/ml.v10i2.1435.
- [6] N. Fadilah and I. Maghfur, “Analisis Pembiayaan Murabahah Dalam Peningkatan SHU Pada Koperasi Karyawan Universitas Yudharta Pasuruan,” *Indones. J. Multidiscip. Soc. Technol.*, vol. 1, no. 3, pp. 244–248, 2023, doi: 10.31004/ijmst.v1i3.200.
- [7] I. Suwangsih, F. Suhariadi, D. Ratmawati, S. Sayyida, and N. Fatimah, “Joint Responsibility System As The Key Success Of Women’s Cooperative Setia Bhakti Indonesian East Java Woman,” *Int. J. Educ. Soc. Stud. Manag.*, vol. 2, no. 2, pp. 83–91, 2022, doi: 10.52121/ijessm.v2i2.66.
- [8] I. R. Ika, R. N. Asfia, and H. Basuki, “Praktik Sistem Tanggung Renteng Dalam Tinjauan Ekonomi Islam Pada Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (Spp) Bumdes Bersama Gemilang Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang,” *J. Islam. Bus. Entrep.*, vol. 1, no. 2, pp. 127–134, 2022, doi: 10.33379/jibe.v1i2.1889.
- [9] A. Karim, Peningkatan Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) i Peningkatan Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). 2022, doi:<https://doi.org/10.37531/celeb.v1i1.160>
- [10] G. S. Sitohang, F. Situmorang, J. Marbun, and K. A. Matondang, “Peran Prinsip Tanggung Renteng dalam Memperkuat Fondasi Solidaritas Anggota Koperasi di Indonesia,” *RIGGS J. Artif. Intell. Digit. Bus.*, vol. 4, no. 2, pp. 3591–3596, 2025, doi: 10.31004/riggs.v4i2.1055.
- [11] R. P. Meldianto and S. Hanani, “Pemberdayaan Perempuan melalui Simpan Pinjam di Nagari Talang Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok,” *J. Dedikasia J. Pengabd. Masy.*, vol. 2, no. 1, p. 32, 2022, doi: 10.30983/dedikasia.v2i1.5539.
- [12] A. Widiastuti, A. Saputri, L. P. Riani, E. Mulyani, and N. Samsudin, “The Implementation of Social Entrepreneurship Values in Village-Owned Enterprise (BUMDes): Is it favorable?,” *J. Econ.*, vol. 21, no. 1, pp. 157–169, 2025, doi: 10.21831/economia.v21i1.79634.
- [13] A. C. T. Rosalia and Joko Priyanto, “Refleksi Unit Usaha Simpan Pinjam dan Transformasi Digital Bumdes Karya Sejahtera Desa Geneng, Jepon,” *El-Mal J. Kaji. Ekon. Bisnis Islam*, vol. 6, no. 9, pp. 3340–3349, 2025, doi: 10.47467/elmal.v6i9.9151.
- [14] U. Haki, E. D. Prahastiwi, and U. T. Selatan, “Strategi Pengumpulan dan Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif Pendidikan,” *J. Inov. dan Teknol. Pendidik.*, vol. 3, no. 1, pp. 1–19, 2024, doi: 10.46306/jurinotep.v3i1.67.
- [15] R. Tania and E. Masyitah, “Analisis Efektivitas Pengawasan Stok Barang Pada PT. Indo Global Sumatera,” *RIGGS J. Artif. Intell. Digit. Bus.*, vol. 4, no. 4, pp. 4650–4662, 2025, doi: 10.31004/riggs.v4i4.4153.
- [16] A. Santoso, E. Kurniawati, and A. U. Dhani, “Kajian Pelaksanaan Verval DTKS di Kota Semarang,” vol. 17, no. 1, pp. 79–94, 2023, [Online]. Available: <http://ripteck.semarangkota.go.id>, DOI: <https://doi.org/10.35475/ripteck.v17i1.176>

DOI: <https://doi.org/10.31004/riggs.v5i1.4988>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

- [17] Hoang Thi Thu Hien, "Joint-liability lending: Does it raise repayment performance?," *VNU Univ. Econ. Bus.*, vol. 5, no. 4, p. 93, 2025, doi: 10.57110/vnu-jeb.v5i4.370.
- [18] N. Yulita and A. Pratiwi, "Analysis of Social Capital Effect in the Joint Liability Group on the Performance of Sharia Cooperatives in Indonesia," *J. Econ. Res. Soc. Sci.*, vol. 6, no. 1, pp. 15–30, 2022, doi: 10.18196/jerss.v6i1.12986.
- [19] U. Hasanah and M. A. Syahrin, "Analisis Efektivitas Dan Tantangan Sistem Pembiayaan tanggung Renteng Pada PNM Mekaar: Perspektif Ekonomi Syariah," *Asy-Syarikah J. Lemb. Keuangan, Ekon. dan Bisnis Islam*, vol. 7, no. 1, pp. 86–99, 2025, DOI: <https://doi.org/10.47435/asy-syarikah.v7i1.3537>
- [20] D. Nurdiana, D. A. Aprijani, F. Amastini, M. R. Maulana, and M. R. P. A. Utama, "Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Pembimbing Lapangan Praktik Kerja Lapangan (PKL) Prodi Sistem Informasi Universitas Terbuka," *Decod. J. Pendidik. Teknol. Inf.*, vol. 4, no. 2, pp. 418–436, 2024, doi: 10.51454/decode.v4i2.433.